

## ABSTRAK

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pemerintah melalui PT. Askes Berdasarkan SK nomor 1241/MENKES/SK.XI/2004 dan nomor 56/MENKES/SK/I/2005 sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin. Setelah beberapa tahun berjalan pada tahun 2014 PT. Askes berubah menjadi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Kesehatan. RSUD Kota Tangerang Selatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan merupakan salah satu rumah sakit yang memiliki fasilitas bedah umum dan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan untuk pasien BPJS Kesehatan di RSUD Kota Tangerang Selatan dan perlindungan hukum dalam pelayanan bedah bagi pasien BPJS Kesehatan di RSUD Kota Tangerang Selatan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode Yuridis Empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analisis. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pelaksanaan pelayanan untuk pasien BPJS Kesehatan di RSUD Kota Tangerang Selatan tidak dibeda-bedakan antara pasien umum dengan pasien BPJS Kesehatan, namun terdapat perbedaan pada administratif dan pembayaran. Adapun perlindungan hukum tidak hanya untuk pasien umum namun juga untuk pasien BPJS Kesehatan, di RSUD Kota Tangerang Selatan sebelum melakukan bedah diwajibkan untuk menandatangani *Informed Consent* oleh dokter, pasien dan keluarga pasien. *Informed Consent* menjadi dasar bagi paramedis maupun pasien dalam tindakan bedah.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan untuk pasien BPJS dan pasien umum tidak dilakukan pembedaan hanya terdapat beberapa perbedaan yaitu dalam administratif dan pembayaran, serta perlindungan hukum pelayanan bedah tidak hanya untuk pasien umum saja namun untuk semua pasien yang berobat di RSUD Kota Tangerang Selatan termasuk BPJS Kesehatan. RSUD Kota Tangerang Selatan diharapkan dapat memaksimalkan fasilitas kesehatan serta menambah tempat tidur bedah dan tenaga kesehatan di bidang bedah agar dapat berjalan dengan lebih maksimal. Perlindungan hukum bagi pasien maupun perlindungan dan tanggung jawab tenaga kesehatan seharusnya diatur dalam pengaturan tersendiri, pengaturan ini diperlukan untuk kepentingan pasien maupun tenaga kerja.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pasien Bedah, BPJS Kesehatan, RSUD Kota Tangerang Selatan**

## **ABSTRACT**

*Health is right of human and one of the elements of welfare that shall be implemented in accordance to purpose of the Indonesian nation that stated in Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. According to the Law No. 36 Year 2009 concerning Health, health is a parameter to measure the success of human development. The Government through PT. Akses according to the SK number 1241/MENKES/SK.XI/2004 and number 56/MENKES/SK/I/2005 as the organizer of the Poor Health Insurance Program. After several years running, on 2014 PT. Akses amended into Agency for the Implementation of Social Security Health in accordance to the Law No. 24 Year 2011 concerning BPJS Kesehatan. The RSUD of South Tangerang City is one of the hospital which has general surgery facilities and in collaboration with BPJS Kesehatan.*

*The problems that become the main issue of this research are to understand the implementation of service for patient of BPJS Kesehatan in RSUD of South Tangerang City and to know how is the legal protection in surgical service for patient of BPJS Kesehatan at RSUD of South Tangerang City.*

*The methods of the research used in this legal thesis are by Juridical Empirical method. The research specification used in this legal thesis is by Descriptive Analysis specification. Data used in this legal thesis are primary data and secondary data.*

*The result that obtained by the research is that the implementation of the service for the patient in South Tangerang City District Hospital in the procedures undertaken by the patient of RSUD of South Tangerang City both BPJS holder and non-BPJS Kesehatan is not differentiated, but there are some differences in the service procedure that is on the registration procedure and payment system. The Legal protection is not only for general patients but for all patients who are seeking for treatment at RSUD of South Tangerang City. For surgical patients they have to sign the Informed Consent to be filled by the patient, the patient's family and the relevant physician for medical action, with the informed consent the paramedics are required to be careful in performing medical actions.*

*It can be concluded that in the procedures undertaken by the patient of RSUD of South Tangerang both BPJS holder and non-BPJS holder and the Legal protection is not differentiated, it is just for surgical patient there is a Informed Consent that must be filled by the patient, the patient's family and the doctor. RSUD of South Tangerang City is expected to maximize the health facilities and add surgical beds. Legal protection for the patient and healthcare worker should be regulated in a separated regulation.*

**Keywords: Legal Protection, Surgical Patient, BPJS Kesehatan, South Tangerang District Hospital.**